|  |  |
| --- | --- |
| LAMPIRAN | |
| PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA | |
| NOMOR 80 TAHUN 2012 |  |
| TENTANG |  |
| PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012 | |

RENCANA KERJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012

1. PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2012

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 ditetapkan alokasi Anggaran Kemendagri Tahun 2012 sebesar Rp.17.134.374.518.000,-. Dalam pelaksanaannya, anggaran Kementerian Dalam Negeri mengalami perubahan yang disebabkan adanya kebijakan nasional untuk efisiensi/penghematan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S-163/MK.02/2012 tanggal 7 Maret 2012 tentang Pemotongan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, pemberian penghargaan (r*eward*), tambahan anggaran dari BA 999 untuk mendanai kegiatan prioritas Kementerian Dalam Negeri, *Drop Loan* dan/atau luncuran/percepatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri serta tambahan anggaran dari optimalisasi Dana Non Pendidikan pada APBN-P 2012 sesuai Surat Nomor S-381/MK.02/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2012. Berdasarkan kebijakan sebagaimana tersebut diatas, maka secara total perubahan alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 adalah berupa penambahan anggaran sebesar Rp. 94.801.566.000,-. Dengan demikian, total alokasi anggaran Kemendagri adalah sebesar Rp.17.229.176.084.000,- yang terdiri dari:

1. Rupiah Murni sebesar Rp.15.514.955.357.000,-, dengan komposisi Anggaran Mengikat sebesar Rp.535.665.291.000,- dan Tidak Mengikat sebesar Rp.14.979.290.066.000,-;
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.34 .096.785.000,-;
3. Pinjaman, Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar RP.1.675.985.835.000,-; dan
4. Pinjaman, Hibah Dalam Negeri (HDN) sebesar RP.4.138.107.000.

Alokasi Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 tersebut telah mengalokasikan kegiatan Prioritas Nasional, diantaranya adalah kegiatan PNPM dengan alokasi sebesar Rp.9.961.739.530.000,- kegiatan Pengembangan (SAK) Terpadu sebesar Rp.3.784.573.713.000.

Pelaksanaan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 terdistribusi pada 13 program, dan dilaksanakan di Pusat (12 Komponen dan 14 Kantor di Daerah), serta dikedaerahkan melalui mekanisme Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pusat (termasuk Kantor Daerah) : Rp.6.418.614.503.000,-
2. Dekonsentrasi : Rp.1.450.943.429.000,-
3. Tugas Pembantuan : Rp. 806.547.001.000,-
4. Urusan Bersama : Rp.8.553.071.151.000,-

Uraian alokasi anggaran pada masing-masing program yang dilaksanakan pada tahun 2 012, adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, bertujuan meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.297.751.000,-.

Program ini dilaksanakan melalui 10 kegiatan, yaitu: (1) Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum; (2) Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; (3) Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan Pelaporan Kinerja; (4) Perencanaan Program dan Anggaran; (5) Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan; (6) Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri; (7) Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset (8) Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi, dan Telekomunikasi; (9) Pengkajian Kebijakan Strategik; dan (10) Pengelolaan Penerangan.

Pada program ini terdapat alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp.7.000.000.000,- dengan lingkup rincian kegiatan yaitu Koordinasi Peningkatan Manajemen Perencanaan dan Pengendalian Penyelenggaraan DKTP dan UB lingkup Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri,

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri.

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, bertujuan meningkatkan kinerja aparatur, dengan alokasi sebesar Rp.213.873.952.000,-. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Dalam Negeri.

1. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.169.607.200.000.-.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; (2) Fasilitasi Politik Dalam Negeri; (3) Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. (4) Fasilitasi Kewaspadaan Nasional; (5) Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

1. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, bertujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.417.342.878.000.-

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah; (2) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan; (3) Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; (4) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana; (5) Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan serta (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp.218.535.510.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:

1. Peningkatan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di wilayah provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 191.885.510.000,-.
2. Pembinaan wilayah dan pemberdayaan tugas pemerintahan umum di kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.400.000.000,-.
3. Pengembangan kerjasama ekonomi daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.250.000.000,-.
4. Fasilitasi penegasan batas daerah secara pasti di lapangan antar daerah provinsi dan kabupaten/kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000.000.-.
5. Pembakuan dan Pembinaan nama-nama rupabumi wilayah administrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.000.000.000.-.
6. Fasilitasi penegasan status hukum batas antar negara, peningkatan kapasitas aparatur, dan peningkatan kegiatan Sosekbud dengan negara tetangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000.000.-.
7. Penegakan Perda, Penyelenggaraan Trantibum dan Tranmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000.-
8. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan sumber daya alam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000.000.-.
9. Dukungan koordinasi dalam sinkronisasi penyelenggaraan KAPET, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000.000.-
10. Peningkatan kapasitas aparatur dalam usaha pengurangan resiko bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000.-.

Disamping itu, terdapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp.59.529.960.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:

1. Pembangunan sarana prasarana di perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.379.960.000,-.
2. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan dalam rangka penanganan bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.150.000.000,-.
3. Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, bertujuan meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang desentralistik. Alokasi anggaran sebesar Rp.100.655.216.000.-

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; (2) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I; (3) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup II; (4) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah; (5) Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD; dan (6) Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga.

Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp.750.477.000.- dengan lingkup rincian kegiatan yaitu Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (SCBD),

Di samping itu, pada program ini terdapat alokasi dana tugas pembantuan sebesar Rp.6.665.821.000,- dengan lingkup rincian kegiatan yaitu Pengembangan kapasitas berkelanjutan untuk Desentraliasi (SCBD)

1. Program Bina Pembangunan Daerah.

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, bertujuan terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.516.227.289.000.-.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah; (2) Fasillitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; (3) Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu; (4) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah; (5) Fasilitasi Penataan Perkotaan; dan (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp.43.000.000.000.- dengan lingkup rincian kegiatan:

1. Peningkatan Peran Provinsi dalam pengendalian Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Program DAK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.500.000.000.-.
2. Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.000.000.000.-.
3. Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,-
4. Koordinasi. Fasilitasi dan Evaluasi terhadap Implementasi Kegiatan Penanganan Lahan Kritis, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,-
5. Dukungan Operasional Penyelengaraan PTSP Provinsi yang berprestasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.500.000.000,-

Di samping itu, pada program ini terdapat alokasi dana tugas pembantuan sebesar Rp.191.300.000.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.173.500.000.000,-.
2. Fasilitasi Pembinaan danPemberdayaan Masyarakat Serta Kapasitas Kelembagaan Penanganan Lahan Kritis, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.800.000.000.-.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bertujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.012.555.764.000.- Program ini dilaksanakan melalui 8 Kegiatan, yaitu (1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional. (2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat; (3) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM); (4) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; (5) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; (6) Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (7); Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; serta (8) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp.1.170.866.342.000.- dengan lingkup rincian kegiatan:

1. Penguatan kelembagaan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.200.000.000,-.
2. Fasilitasi Penguatan Sistem Informasi Posyandu di Daerah melalui Koordinasi dan Pelatihan Ulang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.720.449.000,-.
3. Penguatan Kelembagaan KAD, RAD dan Pemberdayaan dalam Penghapusan Bentuk-bentuk terburuk untuk Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
4. Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.324.806.000,-.
5. Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa bagi kepala desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.400.000.000,-.
6. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Lestari, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,-.
7. PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (LMP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.890.000.000.-
8. Pelatihan Kapasitas Kelembagaan UEDSP/BUMDes, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.280.000.000,-.
9. Koordinasi dan Pendatan Pasar Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.800.000.000,-.
10. Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Pemantauan UPM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.564.920.000,-.
11. PNPM-Pisew, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.268.160.000,-.
12. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaakat Tertinggal dan Pengidentifikasian Wilayah Tertinggal (PWT), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.200.000.000,-.
13. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokasl dan Daerah (PELD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,-.
14. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.069.369.211.000.-.
15. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Keluarahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.008.796.000,-.
16. Penguatan program kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.440.000.000.-.

Di samping itu, pada program ini terdapat alokasi dana Tugas Pembantuan Rp.549.051.220.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:

1. Pembangunan sarana dan Prasarana kantor desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.770.000.000,-.
2. Pembangunan sarana dan prasarana pasar desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.440.000.000,-.
3. PNPM-Lingkungan Mandiri Perdesaan dan Exit Strategi PNPM-LMP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.621.396.000,-.
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan Hidup Lestari, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,-.
5. Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian PNPM Generasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.435.219.824.000,-.

Dalam rangka dukungan pencapaian target prioritas nasional penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan PNPM-MP, pada program ini terdapat dukungan alokasi anggaran dengan mekanisme urusan bersama sebesar Rp.8.553.071.151.000,-.

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bertujuan untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.866.716.892.000.-

Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu; (2) Pengelolaan Informasi Kependudukan; (3) Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil; (4) Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk; (5) Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan; (6) Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan; dan (7) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp.5.000.000.000.- dengan lingkup rincian kegiatan untuk Fasilitasi Penerapan E-KTP di Kab/Kota.

1. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.943.801.000.-.

Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu (1) Pembinaan Anggaran Daerah; (2) Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah; (3) Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan; (4) Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

1. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri.

Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.46.601.735.000,-.

Program dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu (1) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I; (2) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II; (3) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III; (4) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV; (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal; serta (6) Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus.

1. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Program ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan dan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.322.705.000.-.

Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu: (1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah; (2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan; (3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, (4) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan.

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan, bertujuan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui dukungan pendidikan dan pelatihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.175.409.161.000.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu (1) Diklat Bidang Struktural dan Teknis; (2) Diklat Bidang Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah; (3) Diklat Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat; (4) Diklat Bidang Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah; (5) Pendidikan dan Pelatihan Regional dan (6) Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp.5.791.100.000.- dengan lingkup rincian kegiatan untuk koordinasi pembinaan program kediklatan lingkup Provinsi.

1. Program Pendidikan Kepamongprajaan.

Program ini dilaksanakan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri, bertujuan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui Pendidikan Kepamongprajaan, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.350.621.740.000.-

Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan Administrasi Akademik Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan; (2) Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan; (3) Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan; dan (4) Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah.

Ringkasan alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Satuan Kerja, Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran diuraikan pada matriks berikut ini.

ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN 2012

*Dalam Ribu Rupiah*

| **No.** | **SATUAN KERJA/PROGRAM/**  **KEGIATAN** | | **RUPIAH MURNI** | **HDN** | **PHLN** | **P N B P** | **J U M L A H** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI** | | **250.297.751** | **-** | **-** | **-** | **250.297.751** |
| 1.1 | Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum | | 7.500.000 | - | - | - | 7.500.000 |
| 1.2 | Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | | 9.750.000 | - | - | - | 9.750.000 |
| **No.** | **SATUAN KERJA/PROGRAM/**  **KEGIATAN** | | **RUPIAH MURNI** | **HDN** | **PHLN** | **P N B P** | **J U M L A H** |
| 1.3 | Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja | | 9.000.000 | - | - | - | 9.000.000 |
| 1.4 | Perencanaan Program dan Anggaran | | 17.815.376 | - | - | - | 17.815.376 |
| 1.5 | Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan | | 66.777.949 | - | - | - | 66.777.949 |
| 1.6 | Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri | | 7.000.000 | - | - | - | 7.000.000 |
| 1.7 | Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset. | | 100.184.426 | - | - | - | 100.184.426 |
| 1.8 | Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi | | 16.770.000 | - | - | - | 16.770.000 |
| 1.9 | Pengkajian Kebijakan Strategik | | 8.500.000 | - | - | - | 8.500.000 |
| 1.10 | Pengelolaan Penerangan | | 7.000.000 | - | - | - | 7.000.000 |
| **2.** | **PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI** | | **213.873.952** | **-** | **-**  *Dalam Ribu Rupiah* | **-** | **213.873.952** |
| 2.1 | Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 213.873.952 | - | - | - | 213.873.952 |
| **3.** | **PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI** | | **46.601.735** | **-** | **-** | **-** | **46.601.735** |
| 3.1 | Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I | | 3.801.565 | - | - | - | 3.801.565 |
| 3.2 | Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II | | 2.884.668 | - | - | - | 2.884.668 |
| 3.3. | Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III | | 2.747.607 | - | - | - | 2.747.607 |
| 3.4 | Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV | | 3.196.210 | - | - | - | 3.196.210 |
| 3.5 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal | | 30.946.152 | - | - | - | 30.946.152 |
| 3.6 | Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus | | 3.025.533 | - | - | - | 3.025.533 |
| **4.** | **PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | **169.607.200** | **-** | **-** | **-** | **169.607.200** |
| 4.1 | Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan | | 36.170.542 | - | - | - | 36.170.542 |
| 4.2 | Fasilitasi Politik Dalam Negeri | | 42.821.781 | - | - | - | 42.821.781 |
| 4.3 | Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi | | 13.942.500 | - | - | - | 13.942.500 |
| 4.4 | Fasilitasi Kewaspadaan Nasional | | 18.851.250 | - | - | - | 18.851.250 |
| 4.5 | Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | | 25.323.013 | - | - | - | 25.323.013 |
| 4.6 | Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik | | 32.498.114 | - | - | - | 32.498.114 |
| **5.** | **PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM** | | **413.200.613** | **-** | **-** | **-** | **417.342.878** |
| 5.1 | Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah Serta Kerjasama Daerah | | 215.582.665 | - | - | - | 215.582.665 |
| 5.2 | Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Dan Pertanahan | | 18.830.000 | - | - | - | 18.830.000 |
| **No.** | **SATUAN KERJA/PROGRAM/**  **KEGIATAN** | | **RUPIAH MURNI** | **HDN** | **PHLN** | **P N B P** | **J U M L A H** |
| 5.3 | Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat | | 15.255.000 | - | - | -  *Dalam Ribu Rupiah* | 15.255.000 |
| 5.4 | Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana | | 39.738.000 | - | 4.142.265 | - | 43.880.265 |
| 5.5 | Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan | | 85.050.960 | - | - | - | 85.050.960 |
| 5.6 | Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum | | 38.743.988 | - | - | - | 38.743.988 |
| **6.** | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA** | | **9.410.043.327** | **-** | **1.602.512.437** | **-** | **11.012.555.764** |
| 6.1 | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional | | 36.126.985 | - | -  *Dalam Ribu Rupiah* | - | 36.126.985 |
|  | - | Balai PMD Malang | 13.755.412 | - | - | - | 13.755.412 |
|  | - | Balai PMD Yogyakarta | 15.892.573 | - | - | - | 15.892.573 |
|  | - | Balai PMD Lampung | 6.479.000 | - | - | - | 6.479.000 |
| 6.2 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat | | 53.671.456 | - | - | - | 53.671.456 |
| 6.2 | Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) | | 8.719.436.444 | - | 1.242.303.086 | - | 9.961.739.530 |
| 6.3 | Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat | | 260.903.560 | - | 289.412.011 | - | 550.315.571 |
| 6.4 | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan | | 41.889.000 | - | - | - | 41.889.000 |
| 6.5 | Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna | | 137.813.896 | - | 46.699.160 | - | 184.513.056 |
| 6.6 | Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | 61.719.200 | - | 24.098.180 | - | 85.817.380 |
| 6.7 | Dukungan Manajamen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | | 98.482.786 | - | - | - | 98.482.786 |
| **7.** | **BINA PEMBANGUNAN DAERAH** | | **465.779.289** | - | **50.448.000** | - | **516.227.289** |
| 7.1 | Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah | | 57.570.000 | - | 21.281.000 | - | 78.851.000 |
| 7.2 | Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah | | 35.425.000 | - | - | - | 35.425.000 |
| 7.3 | Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu | | 55.864.818 | - | 29.167.000 | - | 85.031.818 |
| 7.4 | Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | 10.073.000 | - | - | - | 10.073.000 |
| 7.5 | Fasilitasi Penataan Perkotaan | | 27.339.000 | - | - | - | 27.339.000 |
| 7.6 | Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah | | 279.507.471 | - | - | - | 279.507.471 |
| **8.** | **PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH** | | **81.772.083** | - | **18.883.133** | - | **100.655.216** |
| 8.1 | Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga | | 8.408.960 | - | - | - | 8.408.960 |
| 8.2 | Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD | | 10.998.370 | - | 5.500.000 | - | 16.498.370 |
| 8.3 | Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah | | 9.800.000 | - | 13.383.133 | - | 23.183.133 |
| **No.** | **SATUAN KERJA/PROGRAM/**  **KEGIATAN** | | **RUPIAH MURNI** | **HDN** | **PHLN** | **P N B P** | **J U M L A H** |
| 8.4 | Penataan Urusan Pemerintahan Daerah I | | 9.411.500 | - | - | - | 9.411.500 |
| 8.5 | Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Direktorat Otonomi Daerah | | 33.741.753 | - | - | - | 33.741.753 |
| 8.6 | Penataan Urusan Pemerintahan Daerah II | | 9.411.500 | - | - | - | 9.411.500 |
| **9.** | **PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | **3.866.716.892** | **-** | **-** | **-** | **3.866.716.892** |
| 9.1 | Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | | 3.784.573.713 | - | -  *Dalam Ribu Rupiah* | - | 3.784.573.713 |
| 9.2 | Pengelolaan Informasi Kependudukan | | 17.950.370 | - | - | - | 17.950.370 |
| 9.3 | Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil | | 5.696.792 | - | - | - | 5.696.792 |
| 9.4 | Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk | | 4.363.128 | - | -  *Dalam Ribu Rupiah* | - | 4.363.128 |
| 9.5 | Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan | | 3.028.410 | - | - | - | 3.028.410 |
| 6.6 | Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan | | 3.211.110 | - | - | - | 3.211.110 |
| 9.7 | Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | 47.893.369 | - | - | - | 47.893.369 |
| **10.** | **PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH** | | **58.943.801** | **-** | **-** | **-** | **58.943.801** |
| 10.1 | Pembinaan Anggaran Daerah | | 6.790.175 | - | - | - | 6.790.175 |
| 10.2 | Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah | | 7.725.175 | - | - | - | 7.725.175 |
| 10.3 | Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan | | 5.090.175 | - | - | - | 5.090.175 |
| 10.4 | Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah | | 8.235.175 | - | - | - | 8.235.175 |
| 10.5 | Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah | | 31.103.101 | - | - | - | 31.103.101 |
| **11.** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI** | | **50.322.705** | **-** | **-** | **-** | **50.322.705** |
| 11.1 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesbangpol dan Otda | | 3.385.000 | - | - | - | 3.385.000 |
| 11.2 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah | | 3.385.000 | - | - | - | 3.385.000 |
| 11.3 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan | | 3.380.330 | - | - | - | 3.380.330 |
| 11.4 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat | | 3.385.000 | - | - | - | 3.385.000 |
| 11.5 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan | | 36.787.375 | - | - | - | 36.787.375 |
| **12.** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI** | | **144.846.014** | **-** | **-** | **30.563.147** | **175.409.161** |
| 12.1 | Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis | | 6.553.193 | - | - | 2.590.836 | 9.144.029 |
| **No.** | **SATUAN KERJA/PROGRAM/**  **KEGIATAN** | | **RUPIAH MURNI** | **HDN** | **PHLN** | **P N B P** | **J U M L A H** |
| 12.2 | Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah | | 7.963.750 | - | - | 235.173 | 8.198.923  *Dalam Ribu Rupiah* |
| 12.3 | Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat | | 6.028.223 | - | - | 1.873.472 | 7.901.695 |
| 12.4 | Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah | | 7.575.410 | - | - | 5.783.003 | 13.358.413 |
| 12.5 | Pendidikan dan Pelatihan Regional | | 48.928.239 | - | - | 19.991.543 | 68.919.782 |
|  | - | Pusdiklatreg Bandung | 23.216.033 | - | - | 8.239.335 | 31.455.368 |
|  | - | Pusdiklatreg Yogyakarta | 12.356.271 | - | - | 5.394.403 | 17.750.674 |
|  | - | Pusdiklatreg Bukittinggi | 7.090.787 | - | - | 4.688.040 | 11.778.827 |
|  | - | Pusdiklatreg Makassar | 6.265.148 | - | - | 1.669.765 | 7.934.913 |
| 12.6 | Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Pendidikan Dan Pelatihan | | 67.797.199 | - | - | 89.120 | 67.886.319 |
| **13.** | **PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN** | | **342.949.995** | **4.138.107** | **-** | **3.533.638** | **350.621.740** |
| 13.1 | Penyelenggaraan Administrasi Akademik Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan | | 33.986.979 | - | - | 3.533.638 | 37.520.617 |
| 13.2 | Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan | | 9.265.641 | - | - | - | 9.265.641 |
| 13.3 | Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan | | 203.606.906 | 4.138.107 | - | - | 207.745.013 |
| 13.4 | Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di daerah | | 96.090.469 | - | - | - | 96.090.469 |
|  | - | IPDN Kampus Bukittinggi | 15.105.063 | - | - | - | 15.105.063 |
|  | - | IPDN Kampus Pekanbaru | 18.074.434 | - | - | - | 18.074.434 |
|  | - | IPDN Kampus Manado | 15.179.635 | - | - | - | 15.179.635 |
|  | - | IPDN Kampus Makassar | 16.023.169 | - | - | - | 16.023.169 |
|  | - | IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat | 10.735.978 | - | - | - | 10.735.978 |
|  | - | IPDN Kampus Kalimantan Barat | 9.001.704 | - | - | - | 9.001.704 |
|  | - | IPDN Kampus Papua | 11.970.486 | - | - | - | 11.970.486 |
|  |  | **J U M L A H** | **15.514.955.357** | **4.138.107** | **1.675.985.835** | **34.096.785** | **17.229.176.084** |

|  |
| --- |
| MENTERI DALAM NEGERI |
| REPUBLIK INDONESIA, |
|  |
| ttd |
|  |
| GAMAWAN FAUZI |

|  |
| --- |
| Salinan sesuai dengan aslinya  KEPALA BIRO HUKUM  ttd  ZUDAN ARIF FAKRULLOH  Pembina Tk.I (IV/b)  NIP. 19690824 199903 1 001 |